

Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Hanisah^{1*}

^{1*} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

* Correspondence: 220602108@student.ar-raniry.ac.id

Received: 8 February 2024
Revised: 15 March 2024
Accepted: 25 March 2024
Published: 30 April 2024.



Citation: Hanisah. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i1.3048>.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study analyzes the influence of capital expenditures and current expenditures on unemployment and poverty levels in 33 regencies/cities of North Sumatra Province during the 2010-2020 period using panel data. The estimation results show that capital expenditures have a positive and significant effect on poverty levels, while current expenditures have a negative and significant effect on poverty levels. Meanwhile, capital expenditures do not have a significant effect on unemployment rates, but current expenditures have a negative and significant effect on unemployment rates. These findings provide policy implications for local governments to optimize the allocation of current expenditures in reducing poverty and unemployment, as well as to review strategies and policies related to capital expenditures to have a positive impact in the long term.

Keywords: Poverty; Unemployment Rate; Capital Expenditure; Current Expenditure; Panel Regression.

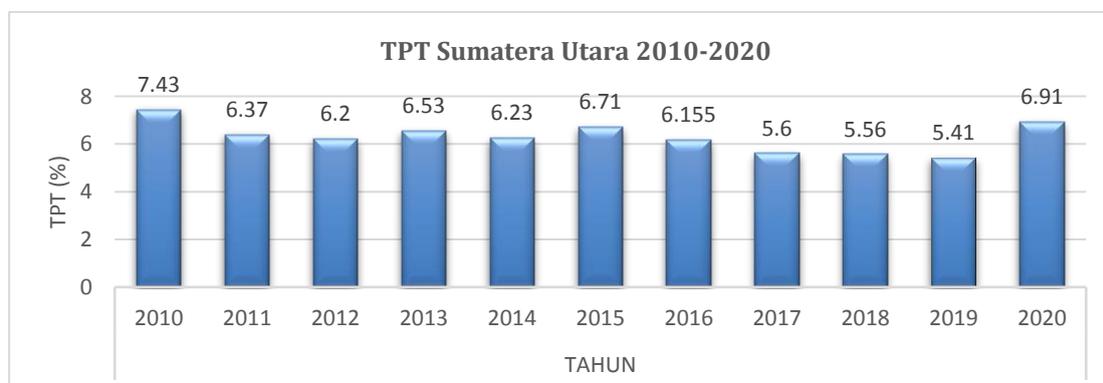
Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010-2020 menggunakan data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, namun belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan alokasi belanja barang dan jasa dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mengkaji ulang strategi dan kebijakan terkait belanja modal agar memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Kemiskinan; Tingkat Pengangguran; Belanja Modal; Belanja Barang dan Jasa; dan Regresi Panel.

1. Pendahuluan

Masalah pengangguran merupakan salah satu permasalahan pokok di Indonesia. Menurut Yenie (2022), dalam penulisannya mengungkapkan bahwa masalah ketenagakerjaan saat ini mencapai tahap yang cukup memprihatinkan. Pengangguran menjadi permasalahan yang dapat berdampak buruk terhadap perekonomian dan masyarakat sehingga tidak dapat memaksimalkan pencapaian kesejahteraan, produktivitas serta pendapatan masyarakat akan berkurang (Sukirno, 2006). Tidak hanya itu, pengangguran dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Permasalahan pengangguran sering menjadi bahan perdebatan politik sehingga banyak politisi menawarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (Mankiw, 2003). Kemiskinan merupakan suatu bentuk permasalahan yang bersifat multidimensional dan kompleks (Yoga *et al.*, 2021). Menurut Henny (2018), kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dari segi tempat berlindung, makan dan minum, kesulitan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta pekerjaan. Kemiskinan muncul akibat berbagai macam faktor yang kompleks. Perkembangan ekonomi tidak bisa dikatakan sebagai indikator penurunan kemiskinan dikarenakan masih terdapat beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik tetapi masih memiliki masalah yang serupa (Qarina, 2022). Dalam penulisannya, M. Nasir (2008) mengungkapkan bahwa kemiskinan di Indonesia diakibatkan oleh upah yang rendah, indeks pembanguana manusia yang kurang serta pengangguran yang tinggi. Di Indonesia, terdapat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal dalam rangka mengupayakan pendapatan dan mengatur alokasi belanja demi kesejahteraan rakyat (Sumiyarti, 2022; Amri, 2022; Sukirno, 2013). Dalam APBN terdapat belanja modal yang merupakan salah satu bentuk instrumen yang digunakan oleh pemerintah bertujuan untuk pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, di dalamnya termasuk pengeluaran biaya meningkatkan kapasitas atau kualitas aset (KEMENKEU, 2022).

Bentuk penerapan belanja modal ditujukan dengan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur lainnya dengan harapan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dan mendorong perekonomian negara (Rahmadi *et al.*, 2022). Selain belanja modal, belanja barang dan jasa merupakan salah satu bentuk anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan guna mensejahterakan masyarakat. Belanja barang dan jasa merupakan suatu bentuk pengeluaran pemerintah yang menampung biaya barang dan jasa bertujuan untuk memproduksi suatu bentuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat (Achmad *et al.*, 2022). Dalam rangka analisis kinerja perekonomian sesebuah negara, Cut Elsa *et al.* (2023) memaparkan penggunaan sumber daya yang ada menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan tenaga kerja. Dari sini dapat lihat bahwa pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan total lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja (Yenie, 2022). Data Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2010-2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif. Tingkat pengangguran pada tahun 2020 di Humbang Hasundutan adalah yang terendah yaitu 0,84 persen sedangkan yang tertinggi adalah Pematangsiantar (11,50 persen). TPT di Sumatera Utara mengalami tren menurun dari tahun 2010-2012 dan ada sedikit kenaikan pada tahun 2013 yaitu 6,53 persen berbanding tahun sebelumnya sebesar 6,2 persen. Kemudian, terjadi lagi tren penurunan TPT dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 6,71 persen menjadi 5,41 persen. Namun, TPT di Sumatera Utara meningkat mencapai angka 6,91 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan hingga mencapai titik 2,07 persen. Salah satu faktor kemerosotan ini adalah akibat dari wabah *covid-19* yang masuk pada Maret 2020 (BPS, 2023).



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 (Sumber: BPS Sumatera Utara)

Fenomena kemiskinan di Indonesia termasuk Sumatera Utara masih terbilang tinggi. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, persentase kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jika dilihat dari data BPS Sumatera Utara, persentase kemiskinan daerah paling tinggi di tahun 2010 adalah Nias Utara dan Gunung Sitoli yaitu masing-

masing sebesar 31,94 persen dan 33,87 persen. Sebaliknya, pada tahun yang sama daerah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Deli Serdang dan Binjai yaitu masing-masing 5,34 persen dan 7,33 persen. Tingkat kemiskinan pada setiap kabupaten di Sumatera utara mengalami fluktuasi. Namun, seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan teknologi, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu dari 11,36 persen menjadi 8,75 persen. Pada tahun 2020, Nias Barat tetap menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Begitu juga dengan Deli Serdang (3,88 persen) dan Binjai (5,71 persen) tetap menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera Utara (BPS Sumatera Utara, 2023). Belanja modal serta belanja barang dan jasa memiliki keterkaitan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sama halnya dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan, total belanja modal serta belanja barang dan jasa di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara berfluktuasi. Alokasi belanja modal serta belanja barang dan jasa pada setiap daerah berbeda-beda tergantung kebijakan daerah masing-masing. Peningkatan belanja modal serta belanja barang dan jasa dapat berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan dikarenakan alokasi belanja dapat meningkatkan infrastruktur yang mempermudah mobilitas sehingga meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Kajian terkait pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu, namun bukti pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan belum memiliki hasil yang konsisten. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Isiaq dan Aduralere (2023), mendapati bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Nigeria yang mana hasil dari penelitian ini sangat bertentangan dengan Rahmadi *et al.* (2022) yang membuktikan belanja modal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran di Jambi. Menurut penelitian Farhah *et al.* (2024), tidak ada hubungan signifikan antara belanja modal dan tingkat kemiskinan. Khodijah *et al.* (2017) berbeda pendapat dengan Farhah dan rekan-rekannya yang mana menurut Khodijah belanja modal memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Kajian belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dilakukan oleh Julien *et al.* (2020) yang mengungkapkan pengeluaran pemerintahan mengurangi resiko pengangguran dan didukung oleh pernyataan Putro (2016) yang mendapati bahwa belanja barang dan jasa berdampak positif terhadap tingkat pengangguran. Namun, ia ditentang oleh Saiful & Meidy (2021) yang mengutarakan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan negatif terhadap pengangguran. Selain itu, beberapa peneliti yang meneliti di Pulau Jawa, Banten dan Indonesia keseluruhan memperlihatkan hasil belanja barang dan jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Hendrawan, 2019; Linda *et al.*, 2022; Qarina, 2022). Pemerintah telah berusaha dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa namun saat ini tingkat pengangguran dan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih cenderung berfluktuasi. Walaupun kajian terkait pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan telah diteliti oleh sejumlah peneliti, namun temuan mereka masih belum memberikan jawaban yang konkrit dan konsisten. Dalam rangka mempertajam analisis terkait pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan, maka urgensi dan eksistensi kajian ini sangat dibutuhkan.

2. Literatur Review

2.1 Keterkaitan Antara Belanja Modal dan Tingkat Pengangguran

Hasil dari penelitian para ahli menunjukkan bahwa ada beberapa keterkaitan antara belanja modal dan tingkat pengangguran. Ada yang menyatakan pengaruhnya positif dan ada pula yang menyatakan bahwa pengaruhnya negatif. Oleh itu, dalam penulisan ini, penulis akan berusaha menggabungkan beberapa hasil tersebut ke dalam satu bentuk narasi yang mudah untuk dipahami. Menurut Isiaq & Aduralere (2023), meneliti tentang dampak belanja modal terhadap tingkat pengangguran di Nigeria selama periode 1981-2020. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *error correction model* (ECM) dan merumuskan hasil penelitian mereka bahwa belanja modal memiliki dampak negatif terhadap tingkat pengangguran di Nigeria. Selanjutnya, dalam kajian yang lain, Putro (2016) dalam penelitiannya selama periode 2006-2013 di wilayah Sumatera menunjukkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Berbeda dengan pendapat Isiaq & Aduralere dan Putro, Rahmadi *et al.* (2022) dalam penelitiannya membagikan belanja modal kepada dua bagian yaitu belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan dalam periode 2008-2020 di Provinsi Jambi. Dalam penelitian tersebut, belanja modal urusan wajib berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran manakala belanja modal urusan pilihan terhadap tingkat pengangguran memiliki dampak positif dan signifikan. Hal ini ditambah lagi oleh Yenie (2019) dalam penelitiannya di Palangka Raya menunjukkan bahwa belanja modal menunjukkan dampak yang tidak signifikan dan cenderung positif terhadap tingkat pengangguran. Di sisi lain, Amri *et al.* (2023) dalam penelitiannya di Indonesia menggunakan data panel 30 provinsi selama periode 2007-2015 dengan membagikan kepada tiga kawasan yaitu barat, timur dan tengah. Penelitian tersebut secara empiris menyatakan bahwa belanja modal di kawasan barat dan tengah Indonesia secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran tetapi belanja modal tidak signifikan menurunkan tingkat pengangguran di kawasan timur Indonesia.

2.2 Keterkaitan Antara Belanja Modal dan Kemiskinan

Hasil penelitian dari para ahli menunjukkan terdapat beberapa bentuk keterkaitan antara belanja modal dengan tingkat kemiskinan. Bentuk dari hasil penelitian para ahli sangat beragam. Sebagian dari hasilnya ada yang positif maupun negatif dan ada yang signifikan maupun tidak signifikan. Penelitian Farhah *et al.* (2024) di provinsi Sulawesi menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara belanja modal dan tingkat kemiskinan. Namun, hal ini bertentangan dengan pendapat Khodijah *et al.* (2017) yang menyimpulkan bahwa hasil penelitian beliau dan rekan-rekan dengan menggunakan metode 2SLS membuktikan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Selain itu, penelitian Amri (2022) di Sumatera Utara selama periode 2010-2020 dengan menggunakan data panel kabupaten dan kota menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah kota dapat menurunkan kemiskinan secara signifikan tetapi belanja modal pemerintah kabupaten adalah sebaliknya. Apabila dilihat dari sudut pandang Teddy (2021) yang menggunakan metode regresi linear dengan jenis data panel. Hasil penelitian Teddy di Maluku membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Justru, hal ini dikuatkan lagi oleh Dewi *et al.* (2019) ketika melakukan studi penelitian di Gorontalo dan merumuskan belanja modal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan selama periode 2010-2016. Selanjutnya, Wenny *et al.* (2019) menemukan bahwa hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Penelitian Wenny dan rekan-rekannya diperkuat lagi oleh Siti Rahmawati & Moh. Khusaini (2018) yang melakukan penelitian di DKI Jakarta selama periode 2004-2016, yang mana hasilnya adalah belanja modal berpengaruh positif secara langsung terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan. Ezra *et al.* (2017) pula memiliki dua sudut pandang yaitu belanja modal secara langsung dan secara tidak langsung. Dari sini, hasil penelitian Ezra dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa belanja modal secara langsung berdampak negatif terhadap kemiskinan. Sebaliknya, belanja modal secara tidak langsung menunjukkan hasil berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan.

2.3 Keterkaitan antara belanja barang dan jasa dan kemiskinan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli, keterkaitan antara belanja barang dan jasa dengan tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan (2019) dimana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja barang dan jasa dari segi kesehatan dan pendidikan menghasilkan dampak yang bervariasi. Namun, pengeluaran untuk kesehatan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan di daerah Pulau Jawa. Penelitian oleh Linda *et al.* (2022) memperlihatkan hasil bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Batu selama periode 2017-2020. Penelitian Linda dan rekan-rekannya didukung oleh Qarina (2022) yang mana bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

2.4 Keterkaitan Antara Belanja Barang dan Jasa dan Tingkat Pengangguran

Dalam pendapat para ahli, keterkaitan antara belanja barang dan jasa dengan tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan oleh Putro (2016) dalam penelitiannya di Wilayah Sumatera selama rentang waktu 2006 - 2013 mendapati bahwa belanja barang dan jasa memiliki dampak positif terhadap tingkat pengangguran. Penelitian Putro juga turut didukung oleh penelitian Julian *et al.* (2020), yang mana belanja pemerintah dapat mengurangi resiko pengangguran. Sebaliknya, Saiful & Meidy (2021) menyatakan bahwa belanja pemerintah di Provinsi Banten berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

3. Metode

3.1 Jenis & Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Data tersebut berbentuk data panel 34 kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode 2010-2020. Variabel yang dioperasionalkan terdiri dari tingkat kemiskinan yang diukur dengan satuan persen, tingkat pengangguran terbuka diukur dengan satuan persen, belanja modal dan belanja barang dan jasa diukur dengan Rp000 per kapita.

1) Tingkat Kemiskinan (persen)

Chairul Nizar *et al.* (2013) dalam penelitiannya mengutip definisi dari Sen (1985) dan Hajiji (2010) terkait kemiskinan adalah kegagalan fungsi beberapa kapabilitas dasar dari seseorang. Sen mengatakan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan yang rendah tetapi dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas. Rezki Mardiatillah *et al.* (2021) menyatakan kemiskinan adalah situasi atau keadaan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang kekurangan harta dan benda yang berharga atau kekurangan modal sama ada dalam bentuk uang, pengetahuan, kebutuhan sosial, politik, hukum maupun kesempatan untuk bekerja.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang dalam lingkup angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi berada dalam kondisi belum mendapatkan pekerjaan (Chairul Nizar *et al.*, 2013). Selain itu,

Shinta (2017) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase masyarakat dari masing-masing provinsi yang dalam keadaan sedang mencari pekerjaan dan tidak memiliki sumber pendapatan.

3) Belanja Modal (Rp000 per kapita)

Belanja modal merupakan suatu bentuk pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk perolehan aset tetap serta aset lainnya dalam rangka pemberian manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah untuk perolehan aset tetap yang meliputi aset seperti perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud lainnya (KEMENKEU, 2022).

4) Belanja Barang dan Jasa (Rp000 per kapita)

Belanja barang dan jasa adalah suatu bentuk anggaran belanja pemerintah yang bertujuan untuk menanggung pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan suatu bentuk produk maupun jasa yang kemudiannya dipasarkan atau tidak dipasarkan kepada masyarakat. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang operasional dan non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan (Achmad *et al.*, 2022).

Dengan regresi panel yang digunakan sebagai model ekonometrik untuk menganalisis dampak belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Model analisis ini diterapkan karena data yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah data panel. Secara numberik, modelnya terlihat seperti yang ditunjukkan pada persamaan pertama.

$$MSKit = \beta_0 + \beta_1 BMit + \beta_2 BBJit + eit \quad (1)$$

$$TPTit = \beta_0 + \beta_1 BMit + \beta_2 BBJit + eit \quad (1)$$

Dimana

β_0 : Konstanta

MSKit : Persentase kemiskinan di daerah i pada periode t

BMit : Belanja modal di daerah i pada periode t

BBJit : Belanja barang dan jasa di daerah i pada periode t

TPTit : Tingkat pengangguran terbuka di daerah i pada periode t

β_1, β_2 : Koefisien estimasi BMit dan BBJit

i : Kabupaten/kota di Sumatera Utara (1, 2, ..., 34)

t : Tahun (2010, 2011, ..., 2020)

e : Error term

Agar koefisien estimasi yang diprediksi melalui regresi panel dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas masing-masing dimensi terhadap tingkat pengangguran terbuka dan persentase kemiskinan, seluruh variabel kemudian ditransformasikan dalam bentuk bentuk logaritma. Dengan demikian persamaan 1 dimodifikasi menjadi persamaan 2.

$$\text{LogMSKit} = \beta_0 + \beta_1 \text{logBMit} + \beta_2 \text{logBBJit} + eit \quad (2)$$

$$\text{LogTPTit} = \beta_0 + \beta_1 \text{logBMit} + \beta_2 \text{logBBJit} + eit \quad (2)$$

Dimana

β_0 : Konstanta

logMSKit : Logaritma persentase kemiskinan daerah ke- i pada tahun t .

logBMit : Logaritma belanja modal daerah ke- i pada tahun t

logBBJit : Logaritma belanja barang dan jasa daerah ke- i pada tahun t

logTPTit : Logaritma tingkat pengangguran terbuka daerah ke- i pada tahun t

β_1, β_2 : Koefisien regresi logMSKit dan logTPTit

i : Provinsi Indonesia (1, 2, ..., 34)

t : Tahun (2010, 2011, ..., 2020)

e : Error term

Analisis regresi panel menyediakan tiga pilihan pendekatan alternatif dalam rangka memperkirakan hubungan fungsional antar variabel yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dalam hal penentuan metode terbaik diantara tiga pendekatan tersebut untuk mengidentifikasi pendekatan mana yang paling akurat agar dapat memprediksi pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan, digunakan *Chow test* dan *Hausman test*. *Hausman test* dimaksudkan untuk mengidentifikasi metode yang paling andal untuk memisahkan *fixed effect model* dan *random effect model*. Sedangkan, *Chow test* dapat memberikan model terbaik dan informasi statistik tentang kecocokan antara *common effect model* dan *fixed effect model* (Muliadi & Amri, 2019). Penegasan pada signifikansi pengaruh salah satu variabel belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan ini mengacu pada nilai p-value yang dihasilkan melalui perhitungan statistik. Apabila suatu variabel memiliki p-value < 0,05

maka variabel tersebut signifikan. Namun sebaliknya, apabila nilai p -value $> 0,05$ maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, penegasan terkait signifikansi variabel belanja modal dan variabel belanja barang dan jasa secara bersama terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah didasarkan oleh nilai “uji F” pada statistik. Dalam hal ini, p -value yang akan dihasilkan dalam uji statistik tersebut akan menjadi penegasan kali ini dengan aturan apabila p -value $< 0,05$ dengan artian bahwa secara bersama variabel belanja modal dan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebaliknya, jika p -value $> 0,05$ maka secara bersama tidak berpengaruh secara signifikan variabel belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif & Matriks Korelasi

Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen yaitu belanja modal dan belanja barang jasa serta dua variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. Belanja modal dan belanja barang dan jasa diukur dengan ribu rupiah perkapita (Rp000 perkapita), sedangkan TPT dan kemiskinan diukur dengan persentase. Belanja modal, belanja barang dan jasa, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara relatif berbeda satu sama lainnya dan berfluktuatif dari tahun ke tahun selama periode 2010-2020. Pada tahun 2020, kemiskinan paling tinggi di Sumatera Utara adalah Nias Barat (25,69 persen) kemudian diikuti oleh Nias Utara (25,07 persen), sedangkan kemiskinan terendah tahun 2020 adalah Deli Serdang (3,88 persen). Dalam periode tahun yang sama, TPT paling tinggi terletak di Pematang Siantar (11,50 persen), manakala yang terendah di Samosir (1,20 persen). Ringkasnya, agar lebih jelas terkait parameter statistik deskriptif dan korelasi antar variabel belanja modal, belanja barang dan jasa, kemiskinan dan tingkat pengangguran dapat dilihat melalui tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa di 33 Kabupaten Provinsi Sumatera Utara

Statistik Deskriptif				
Parameter Statistik	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Belanja Modal (Rp000 per kapita)	Belanja Barang dan Jasa (Rp000 per kapita)
Mean	5,308	12,426	769,741	669,717
Maximum	19.21000	33.87000	3.538,949	2872.894
Minimum	0.150000	3.880000	112,8245	103.0719
Std. Dev.	3.181328	5.705534	573,9296	479.4090
Obs	363	363	363	363

Berdasarkan Tabel 1, variabel peneliti dalam pengaplikasian pada pada penelitian ini mendapati berbagai macam hasil analisa terhadap variabel-variabel tersebut pada setiap kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan data panel pada periode 2010 hingga 2020, kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan tingkat pengangguran paling tinggi (maksimum) ditunjukkan sebesar 19,21 persen, sebaliknya kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran yang paling rendah (minimum) ditunjukkan sebesar 0,15 persen. Secara rata-rata (mean) tingkat pengangguran pada setiap kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 5,30 persen. Dalam periode yang sama, rata-rata (mean) kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 12,42 persen dengan tingkat kemiskinan tertinggi (maksimum) di kabupaten/kota adalah sebesar 33,87 persen dan yang terendah (minimum) sebesar 3,88 persen. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa belanja pemerintah dalam bentuk belanja modal dan belanja barang dan jasa pada setiap kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara berbeda-beda setiap tahunnya selama periode 2010-2020. Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata (mean) belanja modal sebesar Rp769,741 perkapita dengan belanja modal tertinggi sebesar Rp3538,949 perkapita dan yang terendah sebesar Rp112,824 perkapita. Kemudian pada kolom belanja barang dan jasa, dapat dilihat kabupaten/kota dengan belanja barang dan jasa paling tinggi sebesar Rp2872,894 perkapita. Sebaliknya, belanja barang dan jasa yang terendah bernilai Rp103,071 perkapita dengan rata-rata sebesar Rp669,717 perkapita. Dalam rangka menganalisis hubungan belanja modal, belanja barang dan jasa, tingkat pengangguran dan kemiskinan digunakan koefisien korelasi (r). Agar lebih jelas mengenai hubungan korelasi antar variabel dapat dilihat melalui tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Matriks Korelasi antara variabel

Koefisien Korelasi				
	LTPT	LMSK	LBBJ	LBM
LTPT	1			

LMSK	-0.208	1		
LBBJ	-0.277	0.196	1	
LBM	-0.347	0.427	0.779	1

Tabel 2 memperlihatkan arah hubungan antara keempat variabel. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhubungan negatif dengan belanja modal (BM) dan belanja barang jasa (BBJ). Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) yang masing-masing sebesar -0.347 dan -0.277. Nilai koefisien korelasi (r) masing-masing variabel tersebut mengindikasikan adanya hubungan berbanding terbalik antara tingkat pengangguran terbuka di satu sisi dengan belanja modal dan belanja barang jasa di sisi lainnya. Semakin tinggi belanja modal, maka semakin rendah tingkat pengangguran terbuka. Begitu juga dengan belanja barang jasa yang tinggi, maka semakin rendah tingkat pengangguran. Peningkatan belanja modal dan belanja barang jasa secara umum dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hubungan belanja modal terhadap kemiskinan bernilai positif dibuktikan dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0.427. Begitu juga dengan hubungan belanja barang jasa terhadap kemiskinan bernilai positif dengan koefisien korelasi sebesar ($r = 0.196$). Dengan adanya hubungan searah dan saling berbanding lurus antara belanja modal dan belanja barang jasa terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa kenaikan belanja modal dan belanja barang jasa secara umum turut meningkatkan kemiskinan.

4.2 Hasil Estimasi

4.2.1 Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Kemiskinan

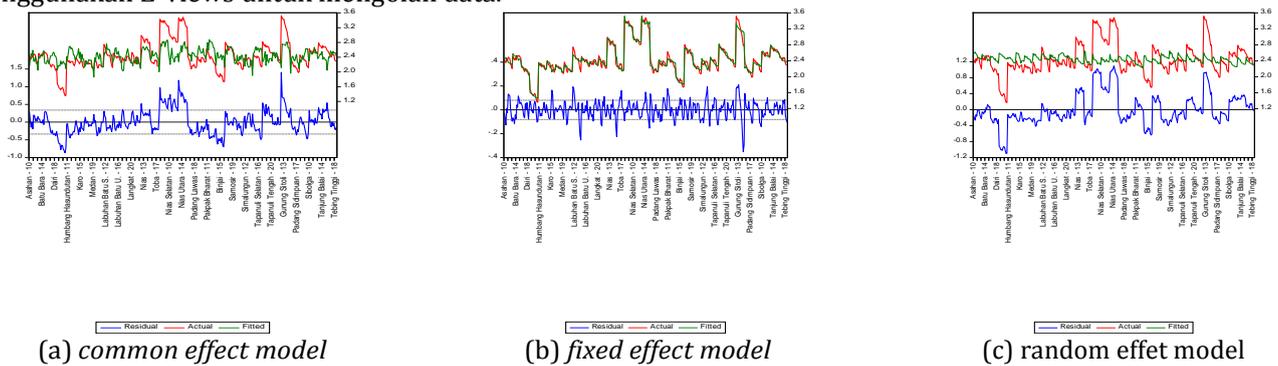
Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, model analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah regresi panel. Model ekonometrika ini terdiri dari tiga pendekatan yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dalam rangka menentukan mana diantara dari tiga pendekatan tersebut yang paling tepat digunakan, digunakan *Chow test* dan *Hausman test*. *Chow test* digunakan untuk menentukan sama ada menggunakan *common effect model* atau *fixed effect model*, sedangkan *Hausman test* digunakan untuk menentukan sama ada menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*. Uji *Chow test* dalam penentuan sama ada menggunakan *common effect model* atau *fixed effect model* didasarkan pada nilai p -value untuk cross-section F dengan ketentuan apabila p -value $> 0,05$, maka model adalah *common effect* dan sebaliknya, jika p -value $< 0,05$, maka model yang dipilih adalah *fixed effect* (Amri, 2019). Pengujian regresi panel (Tabel 3), menunjukkan hasil output dari *Chow test* dan *Hausman test*. Berdasarkan tabel 3 dibawah, dilihat bahwa nilai p -value *cross section F* sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *Chow test*, model yang dipilih adalah *fixed effect model*. Kemudian, dilihat dari *Hausman test* yang menghasilkan nilai X^2 sebesar 27,824 dan p -value sebesar $0,000 < 0,05$. Pembetulan statistik tersebut diperkuat melalui pendekatan pada *fixed effect model* dikarenakan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan *random effect*. Dalam hal ini, regresi panel dengan metode pendekatan *fixed effect* yang diyakini lebih akurat digunakan untuk memprediksi pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3. Hasil estimasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Kemiskinan di 33 Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara

Endogenous variable: logMSK									
effect specification of panel regression									
	Common Effect			Fixed Effect			Random Effect		
	koefisien estimasi	T Stat	P-Value	koefisien estimasi	T Stat	P-Value	koefisien estimasi	T Stat	P-Value
Constant	1,128	6,238	0,000	3,190	43,724	0,000	3,149	35,384	0,0000
logBM	0,400	9,446	0,000	0,041	2,925	0,003	0,047	3,384	0,001
logBBJ	-0,201	-4,697	0,000	-0,161	-12,894	0,000	-0,161	-12,909	0,000
R ²	0,229			0,960			0,348		
Adjusted R ²	0,225			0,955			0,345		
F-stat	53,634			231,910			96,351		
Prob(F-stat)	0,000			0,000			0,000		
Chow-test			Hausman Test						
Effects Test	stat	P-Value	Test Summary		X2 Stat	P-Value			
Cross-section F	187,485	0,000	Cross-section random		27,824	0,000			
Cross-section X ²	1074,354	0,000							

Keputusan pada estimasi tersebut dapat didasarkan pada perbandingan data aktual (data observasi) dengan data yang diperkirakan. Pada selisih data disebut dengan residual. Oleh itu, estimasi yang terbaik adalah estimasi

dengan nilai yang terkecil. Perbandingan gambar residual seperti ditunjukkan dalam grafik 1 berikut yang menggunakan E-views untuk mengolah data.



Gambar 2. Residual, actual & fitted line

Dilihat pada grafik 1 diatas, ketiga-tiga grafik tersebut menjelaskan terkait residual, actual dan fitted line. Estimasi paling kecil ditunjukkan pada pendekatan *fixed effect* pada grafik 1(b). Melalui grafik tersebut terlihat bahwa perubahan pada fitted line lebih mendekati data yang sebenarnya (actual line). Oleh itu, pendekatan *fixed effect* merupakan pendekatan terbaik dibandingkan pada dua pendekatan lainnya. Berdasarkan tabel 3, model statistik yang menjelaskan perkiraan belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap kemiskinan sebagai berikut:

$$\text{LogMSKit} = 3,190 + 0,041\text{logBMit} - 0,161\text{logBBJit}$$

Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien estimasi sebesar 3,190 ($p\text{-value} = 0,000 < 0,05$). Adanya dampak signifikan pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara belanja modal terhadap kemiskinan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Teddy (2021) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini, kemudian didukung lagi oleh Dewi *et al.* (2019) ketika melakukan penelitiannya di Gorontalo yang kemudiannya merumuskan bahwa belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan Farhah *et al.* (2024) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara belanja modal terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini turut didukung oleh Wenny *et al.* (2019) bahwa pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan tidak signifikan dan disetujui oleh Siti Rahmawati & Khusaini (2018) yang menemukan hasil yang serupa ketika melakukan penelitian di DKI Jakarta. Berbeda dengan belanja barang dan jasa yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan melalui koefisien estimasi sebesar -0,161 ($p\text{-value} = 0,00 < 0,05$).

Pernyataan ini mengidentifikasi bahwa peningkatan belanja barang dan jasa sebanyak 1% mendorong penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,161%. Melalui hal ini, dapat dilihat bahwa peningkatan belanja barang dan jasa dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Daerah dengan belanja barang dan jasa yang tinggi relatifnya mengakibatkan tingkat kemiskinan menurun. Dalam kontes ini, terdapat hubungan terbalik antara belanja barang dan jasa dan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa temuan seperti penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan (2019) yang menyimpulkan bahwa belanja barang dan jasa dalam bentuk kesehatan dan pendidikan memberikan dampak yang signifikan. Hal ini selaras dengan temuan Linda *et al.* (2022) yang membuktikan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kota Batu. Namun, temuan Qarina (2022) agak sedikit berbeda pada koefisien estimasinya yang bernilai positif tetapi signifikan antara belanja barang dan jasa terhadap kemiskinan di Indonesia.

4.2.2 Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

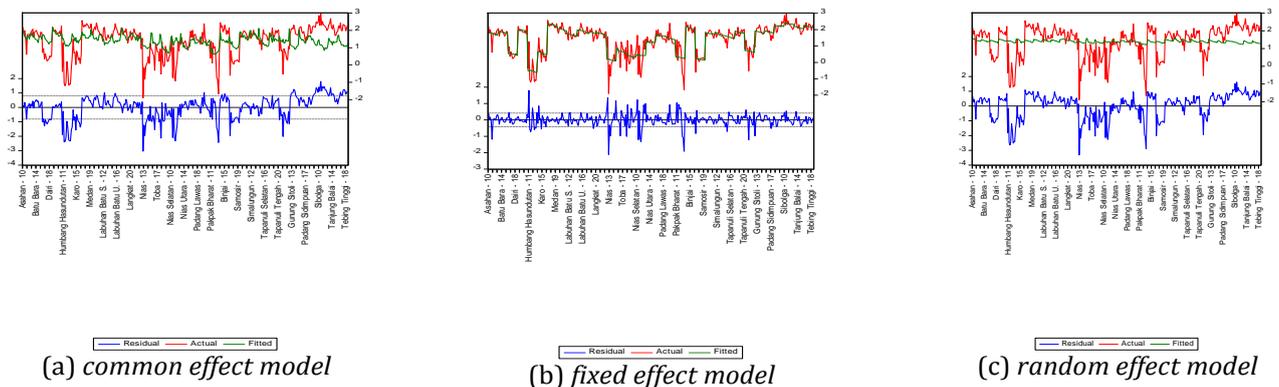
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis regresi panel digunakan sebagai alat analisis data dengan tiga pilihan pendekatan yang terdiri dari *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Hasil estimasi pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara berdasarkan masing-masing pendekatan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil estimasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 33 Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara

Endogenous variable: logTPT		
effect specification of panel regression		
Common Effect	Fixed Effect	Random Effect

	koefisien estimasi	T Stat	P-Value	koefisien estimasi	T Stat	P-Value	koefisien estimasi	T Stat	P-Value
Constant	4,306	9,930	0,000	1,800	4,761	0,000	2,033	5,265	0,000
logBM	-0,431	-4,243	0,000	0,069	0,947	0,343	0,030	0,422	0,672
logBBJ	-0,021	-0,208	0,834	-0,134	-2,069	0,039	-0,131	-2,044	0,041
R ²	0,120			0,786			0,015		
Adjusted R ²	0,115			0,764			0,009		
F-stat	24,717			35,598			2,742		
Prob(F-stat)	0,000			0,000			0,065		
<i>Chow-test</i>					<i>Hausman Test</i>				
Effects Test	stat	P-Value	Test Summary		X2 Stat	P-Value			
Cross-section F	32,019	0,000	<i>Cross-section random</i>		8,078	0,017			
Cross-section X ²	514,291	0,000							

Hasil analisis *Chow test* dan *Hausman test* mengindikasikan bahwa pendekatan regresi panel yang paling tepat digunakan dalam rangka memprediksi pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran adalah *fixed effect model*. Secara statistik, nilai p-value masing-masing uji tersebut lebih kecil dari 0,05 seperti yang diperlihatkan pada tabel 4 diatas. Alasan ekonometriks bahwa *fixed effect model* menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibandingkan *random effect model* dapat dilihat juga pada perbandingan grafik residual seperti yang ditunjukkan pada grafik 2 berikut ini:



Gambar 3. Residual, actual & fitted line

Berdasarkan grafik 2 tersebut, perbandingan garis actual dan garis fitted pada grafik-grafik tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pendekatan *fixed effect model* menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Maka dari itu, model regresi yang dipilih dan dijadikan dasar estimasi pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Utara. Mengacu pada Tabel 4 diatas, model regresi panel adalah seperti berikut:

$$\text{LogTPTit} = 1,800 + 0,069 \text{ logBMit} - 0,134 \text{ logBBJit}$$

Pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran adalah positif tetapi tidak signifikan dengan koefisien estimasi sebesar 0,069 dan p-value sebesar 0,343 > 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal tidak berdampak pada tingkat pengangguran terbuka. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Yenie (2019) pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran cenderung positif dan tidak signifikan. Namun, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Amri *et al.* (2023), belanja modal secara signifikan menurunkan pengangguran di kawasan timur Indonesia. Berbeda dengan temuan penulis, temuan Isiaq & Aduralere (2023) mendapati bahwa belanja modal memiliki dampak negatif terhadap pengangguran di Nigeria dan ini turut didukung oleh Putro (2016) yang menunjukkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap pengangguran di wilayah Sumatera. Apabila dilihat dari variabel belanja barang dan jasa memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan koefisien estimasi sebesar -0,134 dan p-value sebesar 0,039 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja barang dan jasa secara nyata berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Peningkatan belanja barang dan jasa sebesar 1% akan mendorong penurunan pengangguran sebesar 0,314%. Sebaliknya penurunan belanja barang dan jasa akan meningkatkan pengangguran. Dengan demikian, masing-masing kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara secara umum sangat sensitif terhadap perubahan belanja barang dan jasa. Indikasi ini mendasari alasan bahwa eksistensi belanja barang jasa terlibat dalam kegiatan perekonomian sehingga mampu berkontribusi terhadap penurunan tingkat

pengangguran. Temuan Saiful & Meidy (2021) selaras dengan temuan penulis yaitu belanja barang jasa berpengaruh secara signifikan dan memiliki dampak negatif terhadap tingkat pengangguran di provinsi Banten. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Putro (2016) yang menemukan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan ia didukung oleh Julian *et al.* yang turut mendapatkan hasil yang serupa.

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil analisis dari variabel-variabel yang diuji yaitu belanja modal dan belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di 33 kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Belanja modal cenderung mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kemiskina di Sumatera Utara. Peningkatan belanja modal cenderung mendorong peningkatan kemiskinan di Sumatera Utara. Berbeda dengan belanja modal, belanja barang dan jasa memiliki pengaruh secara signifikan dan neagatif terhadap tingkat kemiskinan Sumatera Utara. Dalam hal ini, peningkatan belanja barang dan jasa dapat menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Disisi lain, peneliti mendapati bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Peningkatan belanja barang dan jasa dapat menurunkan tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Berdasarkan dari temuan-temuan ini, beberapa hal disarankan agar dapat mengurangi tingkat kemiskina dan tingkat pengangguran terbuka di 33 kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Saran tersebut merupakan pengoptimalisasi pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam mengalokasikan belanja barang dan jasa untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Prioritaskan pada pengeluaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang strategi dan kebijakan terkait belanja modal agar memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan. Belanja modal yang tepat sasaran dan berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, evaluasi secara berkala hendaklah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap efektivitas belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap kemiskinan dan pengangguran. Evaluasi ini dapat menjadi dasar kebijakan di masa mendatang. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Utara seperti investasi, pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Temuan ini dapat melengkapi kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran secara lebih komprehensif.

6. Referensi

- Adnan, G., & Amri, K. (2020). Apakah pendapatan perempuan dapat mengurangi kemiskinan? Bukti data panel di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8(1), 64-71. DOI: <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v8i1.1235>.
- Albertini, J., Auray, S., Bouakez, H., & Eyquem, A. (2021). Taking off into the wind: Unemployment risk and state-dependent government spending multipliers. *Journal of Monetary Economics*, 117, 990-1007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2020.07.007>.
- Amanda, Y., Zamzami, Z., Selamat, S., Prodi, R., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis dampak belanja modal dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo. *Jurnal Ekonomi*, 10(1).
- Amri, K. (2020). Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *AL-MUZARA'AH*, 7(2), 57-70. <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.57-70>.
- Amri, K., Ekonomi, F., Islam, B., Ar-Raniry, U., & Aceh, B. (n.d.). Pengaruh belanja pemerintah dan kredit UMKM terhadap tingkat kemiskinan: Peran pengangguran sebagai pemoderasi (studi komparatif antar wilayah administratif di Provinsi Sumatera Utara).
- Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 2005-2021. (2022).
- Fahira, C. E., Chalisa, D., Karila, N., Rezaldi, M., Ramadhani, R. W., & Amri, K. (2023). Pengaruh belanja modal terhadap pengangguran di Indonesia. *Journal of Law and Economics*, 2(1), 10-21. DOI: <https://doi.org/10.56347/jle.v2i1.174>.
- Fauziyah Irawan, F., Junaidi, J., Studi, P., Fakultas, A., & Dan Bisnis, E. (2024). Analysis of the effect of social assistance

- and capital expenditure on poverty. *Jurnal Ekonomi*, 1(1).
- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of capital expenditures, development index and unemployment on poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.1998>.
- Kaligis, E., Engka, D. S. M., Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). Pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di Minahasa Utara melalui pertumbuhan ekonomi sebagai intervening variabel. *Effect of Capital Expenditure on Poverty in North Minahasa through Economic Growth as Intervening Variables*.
- Laksamana, R. (2016). Pengaruh PDRB terhadap pengangguran di kabupaten/kota Kalimantan Barat. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 5(2), 111-134.
- Leasiwal, T. C. (2021). Impact of government capital expenditure on poverty levels in Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 15(1).
- Mardiatillah, R., Panorama, M., Sumantri, R., & Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, F. (n.d.). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2015-2019. *Jurnal Kinerja*, 18(2), 2021-2279. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>.
- Mustaqimah, K., Hartoyo, S., & Fahmi, I. (2017). Peran belanja modal pemerintah dan investasi pembangunan manusia dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 1-15.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192. DOI: <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>.
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN*, 2302, 172.
- Olasunkanmi OSENI, I., & Oyelade, A. O. (2023). Effect of capital expenditure on unemployment rate in Nigeria. *African Journal of Economic Review*, 11(3).
- Putro, R. P. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(2), 81-95. DOI: <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i2.53>.
- Rahmadi, S., Hastuti, D., & Parmadi, P. (2022). Pengaruh belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 213-234. DOI: <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.15726>.
- Rahmawati, S. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Melalui Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2004-2016. *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* <http://repository.ub.ac.id/163004>.
- Rarun, K., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis Dampak Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Kota-Kota Di Sulawesi Utara. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 20(3), 1-13.
- Sumiyarti, S. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 28-43.
- Taruno, H. T. (2019). Public spending and poverty reduction in Indonesia: The effects of economic growth and public spending on poverty reduction in Indonesia 2009-2018. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 4(2), 49-56.
- Tri Septiani, W., Zamzami, Z., & Mustika, C. (2019). Analisis pengaruh pendapatan perkapita dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8 (3), 135148.
- Zulfikar, M. S. I., & Haviz, M. (2022, January). Pengaruh Upah Minimum, Investasi, Dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Periode 2006-2020. In *Bandung Conference Series: Economics Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 43-51).